



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD BAIHAQI
2. Jabatan : AUDITOR MADYA SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH
DAERAH
3. NHK : 53991

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	600.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.900.000
1. MOBIL, SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.900.000		
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.500.000
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	36.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	763.900.000
III. HUTANG	Rp.	416.096.850
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	347.803.150

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.